LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG *ROADMAP* NUSA TENGGARA BARAT HALAL *INDUSTRIAL PARK*TAHUN 2022-2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan beberapa peraturan daerah (Perda) dalam mempercepat perekonomian berbasis Industri. Pertama Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021-2024. Tujuannya untuk memayungi setiap *stock holder* sebagai pelaku industri yang sejalan dengan pembangunan perindustrian nasional, industri daerah yang maju, berdaya saing dan mandiri serta kepastian berusaha. Peraturan kedua adalah Perda No.3 tahun 2020 terkait pembangunan ekonomi kreatif. Pembangunan ekonomi kreatif merupakan pembangunan industri kreativitas berbasis IT, Seni dan Budaya. Dengan demikian, payung hukum terkait pembangunan industri cukup lengkap di NTB.

Lahirnya dua peraturan daerah tersebut belum sejalan dengan percepatan industrialisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara deskriptif dapat diamati dari share sektor industri terhadap PDRB NTB yang masih relatif kecil, yaitu 4 persen di tahun 2020 dan 2021 (BPS, 2022). Bila diamati dari jumlah UMKM berdasar klasifikasi usaha, UMKM di NTB masih didominasi usaha mikro dan kecil. Berdasar data 2021 dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, pada 2021 dari total 103.284 jumlah UMKM, terdapat 86.922 unit (84,16 Persen) berupa usaha mikro dan 15.119 (14,6 persen) adalah usaha kecil. Sementara itu, usaha menengah hanya 1243 (1,2 persen). Hal ini menunjukkan proses UMKM naik kelas masih relatif lamban.

Dari data penanaman modal dari DKPMPT-SP juga menunjukkan hal yang sama yaitu masih rendahnya pertumbuhan investasi sektor industri. Realisasi investasi dalam skema PMDN (Penanaman Modal Dalam negeri) adalah sebesar 7,65 persen di tahun 2020, menurun menjadi 1,67 persen dari total PMDN di tahun 2021. PMA (penanaman modal asing atau PMA mengalami trend yang sama yaitu menurun dari 0,10 persen di tahun 2020 menjadi 0,04 dari total PMA di tahun 2021. Memang diakui perlambatan penanaman modal adalah disebabkan terjadinya pandemi Covid-19 di tahun tersebut. Namun, angka kontribusi sektor industri/ perindustrian relative kecil dibanding dengan sektor lainnya.

Melihat perkembangan beberapa tahun di atas, perlu ada strategi lain dalam

mempercepat pertumbuhan industri (perusahaan), produk industri dan investasi bidang industri. Bila selama ini pengembangan industri diintervensi dalam membesarkan unit industri (IKM) atau produk industri manufaktur maka upaya lain adalah dengan membangun kawasan industri. Konsep kawasan industri berbasis ekosistem industri, akan terbangun secara sekaligus di dalamnya produk, perusahaan, SDM serta jejaring ekosistem kawasan industri.

Pembangunan kawasan industri, bila dilihat dari *trend* dunia, maka yang sedang maju pesat saat ini adalah pembangunan kawasan industri halal atau *halal industrial park* (HIP). Kesadaran masyarakat menggunakan produk halal meningkat drastis, hal ini ditandai dengan permintaan sertifikasi halal yang meningkat. Konsumsi makanan halal di Indonesia bahkan tercatat menembus Rp. 2400 triliun lebih per tahun, sedangkan secara global diprediksi mencapai US\$ 1369 triliun di 2024. Namun yang paling mengejutkan, berdasar data laporan *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) 2020/2021 bahwa 5 negara eksportir produk halal terbesar adalah Amerika Serikat (AS), India, Brasil, Prancis dan Rusia. Tidak satu-pun negara muslim, terutama Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar di dunia.

Mengatasi persoalan di atas, PERMENPERIN NO. 17/2020 mengatur tentang penetapan kawasan industri halal untuk meningkatkan kapasitas produksi halal di tanah air. Sampai dengan 2022, kawasan Industri yang sudah memperoleh Surat Keterangan KI Halal ada 3 (Tiga) kawasan, yang sudah memiliki rencana KI Halal juga 3 (Tiga) Kawasan dan yang dalam tahap perencanaan KI Halal: 3 (Tiga) Kawasan Industri dan 1 (Satu) KEK. Kawasan industri halal eksisting terdiri dari: Modern Cikande Industrial Estate, Kawasan Industri Safe N Lock dan Bintan Inti Industrial Estate. Sedang dalam tahapan perencanaan terdapat Batamindo Industrial Park, Kawasan Industri Surya Borneo dan Jakarta Industrial Estate Pulogadung.

Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang memiliki potensi tidak saja tersedia secara memadai bahan baku industri di bidang perikanan dan kelautan, peternakan dan perkebunan juga dalam industri jasa pariwisata diharapkan menjadi bagian yang mendapat perhatian untuk pembangunan kawasan industri halal. Mengingat Provinsi Nusa Tenggara Barat (pulau Lombok) sempat mendapat penghargaan 2 (dua) penghargaan World Halal Travel Awards (WHTA) 2015 untuk kategori World Best Halal Tourism Destination dan *World Best Halal Honeymoon Destination*. Selanjutnya pada Tahun 2019 Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) menempatkan Pulau Lombok pada peringkat pertama sebagai destinasi halal unggulan di Indonesia. Selain itu di Provinsi NTB terdapat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di mana KEK tersebut tengah dikembangkan menjadi kawasan pariwisata super prioritas di Indonesia. Kawasan industri halal yang diusulkan di NTB adalah kawasan terintegrasi antara industri manufaktur halal dan kawasan destinasi halal.

Berdasar hal tersebut di atas, diperlukan dokumen perencanaan atau tahapan kerja berupa

road map dalam rangka mempersiapkan pembangunan kawasan industri halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Maksud dan Tujuan

Road map NTB HIP dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam lingkup Provinsi NTB, dunia usaha dan industri dan berbagai pihak terkait dalam membangun berbagai tahapan kawasan industri halal.

Adapun tujuan *road map* adalah untuk menyiapkan kerangka kerja perencanaan pembangunan kawasan industri halal yang sesuai dengan tata ruang dan didukung infrastruktur dan kelembagaan serta berwawasan lingkungan di lingkup daerah Nusa Tenggara Barat. Hal ini diharapkan mampu menarik investasi, mengatasi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup bahasan dalam road map NTB HIP terdiri dari:

- 1. Pendahuluan, yang berisi latar belakang pentingnya pembangunan kawasan industri halal di NTB
- 2. Gambaran Umum potensi pengembangan kawasan industri halal di NTB
- 3. Konsep Halal Industrial Park yang berisi pembahasan kawasan industri dalam perspektif literatur dan peta serta entitas yang berperan dalam kawasan.
- 4. Road map NTB HIP yang terdiri dari tahap persiapan, pembangunan dan pengelolaan.
- 5. Penutup yang berisi saran dalam mempercepat pembangunan NTB HIP.

BAB II

GAMBARAN UMUM POTENSI NTB

Dalam mengembangkan kawasan industri tidak saja dibutuhkan ketersediaan bahan baku dan pelaku industri. Namun juga aksesibilitas seperti sistem logistik yang memadai untuk mempermudah distribusi dan pemasaran barang dan jasa. Sistem logistik terdiri dari transportasi, telekomunikasi, pergudangan dan lain-lain. Sistem logistik yang memadai, menjadikan kawasan mudah mendatangkan bahan baku sekaligus distribusi produk industri ke pasar. Sistem logistik yang memadai juga mempermudah wisatawan untuk datang ke kawasan. Sistem logistik yang baik merupakan salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modal di kawasan.

Bila dilihat dari aspek bahan baku, sebagai penentu industrialisasi. Sektor maritim (perikanan), perkebunan dan peternakan masih cukup memadai di NTB. Secara geoekonomi, NTB diapit oleh potensi ekonomi wisata KEK Labuan Bajo sebelah timur dan potensi wisata Bali di sebelah barat.

Sektor pariwisata yang merupakan *core* ekonomi NTB, tentu tidak diragukan lagi dalam potensi pengembangan pariwisata. NTB memiliki pusat-pusat destinasi yang tidak saja diakui nasional, namun juga dunia. Kawasan pariwisata salah satu unsur untuk mengundang pelaku bisnis untuk berinvestasi pada sektor pariwisata. Sehingga kehadiran kawasan industri halal akan turut terangkat sejalan dengan NTB menjadi pusat perhatian dunia akibat kemajuan sektor pariwisata. Sebagai pusat tujuan wisata, NTB membuktikan diri mampu menyelenggarakan event berskala internasional. Seperti perhelatan Moto GP dan WSBK. Sebentar lagi tengah diagendakan Grand Prix Motor Cross di kawasan SAMOTA.

Dalam konteks pengelolaan industri, NTB tengah menggalakkan industrialisasi. Khususnya dalam visi dan misi pemerintahan NTB yang tertuang dalam RPJMD. Beberapa upaya pengembangan produk industri diciptakan. Beberapa kawasan ekonomi ada yang sudah berjalan, ada pula yang dalam progres. Beberapa yang sudah jalan misalnya KEK mandalika. Sedangkan yang tengah disiapkan antara lain, Kawasan Samota, kawasan Industri Smelter, kawasan Shrimp estate di Sumbawa, kawasan food estate di Sumbawa, kawasan La Sakosa (Lambu sape, Komodo Sangian) dan Global Hub Lombok Utara. Dengan demikian, Provinsi NTB relatif siap dan punya sejarah pengembangan untuk menyusun kawasan industri halal.

SUMBER BAHAN BAKU PERIKANAN

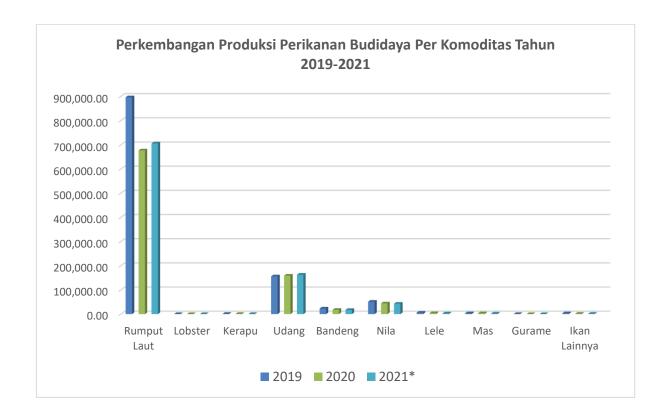
Salah satu produk yang potensial yang dihasilkan NTB adalah produksi perikanan. Pada 2019 produksi melebihi 1,14 juta ton. Mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021. Bila dilakukan secara serius, produksi ikan akan minimal sama dengan tahun 2019 atau

bahkan mengalami peningkatan. Komoditas yang paling banyak dihasilkan adalah rumput laut dan udang. Bila dilihat dari pohon industri, pengelolaan rumput laut dan udang cukup luas untuk dikembangkan sebagai bahan baku industri.

Tabel. 2.1 Produksi Perikanan Budidaya Per Komoditas

No.	Jenis Ikan	Produksi Jenis Ikan F	Perikanan Budidaya	(Ton)				
INO.	Jenis Ikan	2019	2020	2021*				
1	Rumput Laut	896,760.37	677,110.76	705,932.94				
2	Lobster	-	68.01	137.72				
3	Kerapu	751.15	488.11	386.9				
4	Udang	156,046.29	159,013.10	162,993.11				
5	Bandeng	23,106.69	17,577.67	17,290.42				
6	Nila	51,233.26	44,075.59	42,836.19				
7	Lele	5,842.48	3,703.57	2,470.03				
8	Mas	3,371.51	3,435.18	1,987.43				
9	Gurame	228.87	115.26	109.67				
10	Ikan Lainnya	3,211.50	1,429.36	1,377.61				
	Jumlah	1,140,552.12 907,016.61		935,522.02				
	Catatan: *Angka Sementara belum divalidasi							

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2021

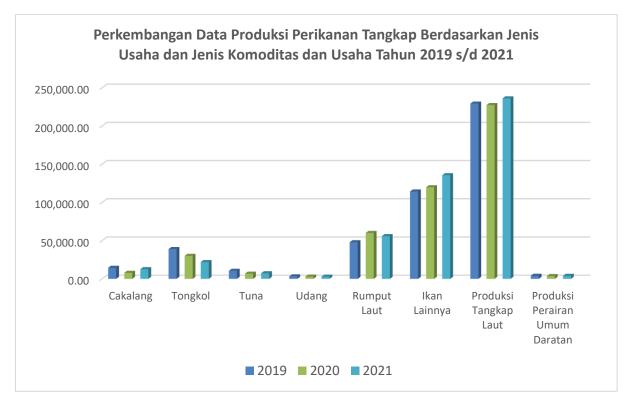


Demikian pula dengan produksi perikanan tangkap, total produksi hasil laut mencapai 239, 95 ribu ton. Selama ini, hasil produksi hasil laut umumnya untuk diekspor diolah (dikemas) sebagai produk industri di daerah.

Tabel. 2.2 Produksi Perikanan Tangkap

No.	Uraian/Nama Ikan	Produksi Tahun (Ton)				
110.	Ordian/Nama ikan	2019	2020	2021		
1	Cakalang	14,459.77	7,818.28	12,617.03		
2	Tongkol	38,888.28	30,027.18	21,908.62		
3	Tuna	10,482.62	6,761.73	7,320.46		
4	Udang	3,257.88	2,908.64	2,800.39		
5	Rumput Laut	47,903.86	60,044.88	55,870.06		
6	Ikan Lainnya	114,254.88	119,715.68	135,529.13		
7	Produksi Tangkap Laut	229,247.29	227,276.39	236,045.69		
8	Produksi Perairan Umum Daratan	4,021.18	3,617.99	3,908.76		
	Total Produksi PT	233,268.47	230,894.38	239,954.45		

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2021



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2021

SUMBER BAHAN BAKU PETERNAKAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat, memberi perhatian besar dalam pengembangan komoditas Sapi. Hal ini dibuktikan dengan relatif tingginya produksi daging sapi dibanding dengan hewan sejenis seperti kerbau, kuda, kambing dan lain-lain. Mengingat luas lahan

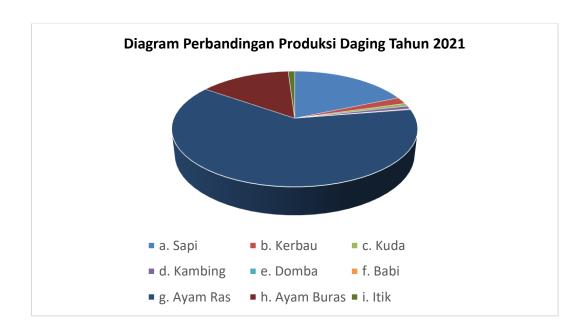
penggembalaan di NTB masih relatif memadai, sangat dimungkinkan peternakan hewan ternak untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya sebagai bahan baku industri.

Hlirisasi industri bidang peternakan sangat mungkin dilakukan. Hal ini sesuai dengan RPJMD dan misi pemerintah daerah dalam menumbuhkan industrialisasi. Ke depan diharapkan produksi ternak tidak lagi dalam bentuk daging segar, namun perlu dilakukan pengolahan sesuai pohon industri. Data produksi daging ternak, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Data Ketersediaan Produksi Daging dan Telur Tahun 2021

No.	Uraian	Ketersedia	an Produksi	(Ton) Tahun
INO.	Ordian	2020	2021	Naik/Turun (%)
1	Ketersediaan Produksi Daging			
	a. Sapi	13,801.0	14,242.6	3.20
	b. Kerbau	1,426.0	1,451.7	1.80
	c. Kuda	606.0	647.8	6.90
	d. Kambing	663.0	696.2	5.01
	e. Domba	28.0	29.0	3.57
	f. Babi	144.0	147.9	3.57
	g. Ayam Ras	46,281.9	48,942.3	5.75
	h. Ayam Buras	10,565.0	12,308.2	16.50
	i. Itik	762.0	979.9	28.60
	Jumlah	74,276.9	79,445.6	8.32
2	Ketersediaan Produksi Telur			
	a. Ayam Ras	43,374.1	64,986.9	49.83
	b. Ayam Buras	32,330.9	37,673.3	16.52
	c. Itik	7,192.6	9,251.2	28.62
	Jumlah	82,897.6	111,911.4	31.66

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2021

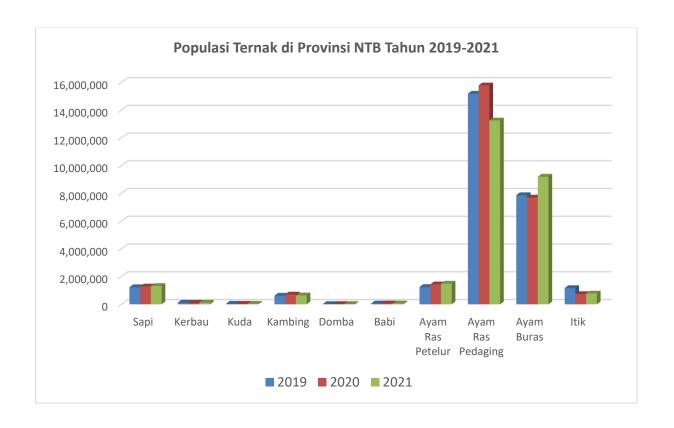


Berdasar populasi ternak, di NTB terdapat beberapa ternak yang populasinya mencapai lebih dari 1 juta ekor, yaitu: Sapi, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging dan ayam buras. Bila peternakan dijadikan bahan baku industri, populasi ternak tentu berpeluang untuk ditingkatkan jumlahnya. Berikut tabel Populasi ternak di NTB 2019-2021.

Tabel 2.4 Populasi Ternak di Provinsi NTB Tahun 2019-2021

No.	Ternak	Populasi Ternak (Ekor)				
110.	remak	2019	2020	2021		
1	Sapi	1,234,357	1,285,746	1,320,551		
2	Kerbau	121,572	115,151	120,110		
3	Kuda	47,292	43,705	41,715		
4	Kambing	622,039	709,768	641,186		
5	Domba	21,862	23,058	23,044		
6	Babi	60,066	69,518	64,777		
7	Ayam Ras Petelur	1,246,699	1,438,497	1,490,090		
8	Ayam Ras Pedaging	15,187,650	15,787,388	13,257,299		
9	Ayam Buras	7,870,476	7,697,844	9,201,252		
10	Itik	1,169,034	737,703	778,858		

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Data Sementara 2021



SUMBER PASAR PARIWISATA

Pariwisata menjadi *core* bisnis bagi perekonomian Nusa Tenggara Barat. Sebelum pandemi Covid-19 jumlah kunjungan hampir 4 juta orang. Namun pada masa pandemi, jumlah kunjungan mengalami penurunan drastis. Pada 2021 jumlah kunjungan terealisasi sebesar 964 ribu orang. Namun, pada saat penyelenggaraan moto GP dan WSBK diprediksi jumlah kunjungan meningkat. Terutama akibat pemerintah memberi kelonggaran kunjungan, setelah tercapainya target vaksinasi dan penurunan trend jumlah kasus Covid-19.

Dengan semakin berkurangnya kasus Covid-19 diprediksi angka kunjungan wisatawan di NTB mengalami peningkatan. Berikut data jumlah kunjungan wisatawan beberapa tahun terakhir.

Tabel 2. 5 Jumlah target dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi NTB

No.	Indikator Bidang	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
INO.	Urusan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2,552,634	3,706,352	4,000,000	400,595	1,000,000	964,036	
2	Peningkatan Persentase Destinasi Pariwisata yang Minimal Berkembana	25.25%	25.25%	45.45%	45.45%	65.66%	67.68%	



Bila dirinci lagi, wisatawan yang paling banyak berkunjung di masa pandemi Covid-19 adalah berasal dari wisatawan nusantara. Ke depan, tentu diharapkan pertumbuhan wisatawan luar negeri (asing) juga mengalami peningkatan. Berikut data jumlah kunjungan wisatawan berdasar asal wisatawan.

Tabel 2.6 Angka Kunjungan Wisatawan Tahun 2019-2021

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2019	2020	2021	
		RPJMD 2019	2013	2020	Target	Realisasi
1	Kunjungan Wisatawan	3,706,352	3,706,352	400,595	1,000,000	964,036
2	Nusantara	2,155,561	2,155,561	360,613	900,200	952,146
3	Mancanegara	1,550,791	1,550,791	39,982	99,800	11,890

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2021



POTENSI PENGEMBANGAN HALAL INDUSTRIAL PARK

Gambaran umum potensi sumberdaya yang dimiliki NTB untuk memenuhi aspek ketersediaan bahan baku (material) yang memadai untuk menunjang kawasan industry termasuk melimpah. Semua sektor menujukkan data yang variatif tetapi secara keseluruhan artinya kesiapan sumberdaya daerah kita sangat mendukung. Sehingga dalam konsteks industry halal, pengelolaan sumberdaya inilah yang terpenting agar syarat untuk masuk kategori halalnya terpenuhi. Sejauh ini belum ada pemetaan dan data yang mampu memotret bagaimana *processing* bahan baku yang dilakukan oleh masyarakat kita sebagai penyedia sumberdaya. Proses menjadi penting dalam industry halal, karena akan terkait dengan kualitas yang akan diperoleh nantinya di tahapan hilir saat telah menjadi produk olahan yang dikonsumsi atau digunakan masyarakat. Dari sektor perikanan misalnya, bagaimana masyarakat menangkap ikan, mengangkut hasil ataupun didinginkan terlebih dahulu sebelum didistribusikan dan kemudian dijual harus memenuhi konsep konsep halal. Demikian pula di sektor peternakan, pariwisata dan lain sebagainya, konsep halal industry menjadi prioritas dalam semua tahapan proses yang dilakukan di dalamnya. Oleh karenanya, Roadmap ini menjadi panduan yang akan mengakomodir pola pola industry yang umumnya dilakukan masyarkat kita dalam menyiapkan sumberdaya untuk tujuan industry halal. Melalui regulasi regulasi yang diturunkan dari roadmap ini maka kawasan industry halal secara bertahap akan diatur agar masyarakat kita terbiasa melakukan semua proses industry sesuai dengan konsep halal.

Untuk menuju kawasan industry halal dalam konteks ketersediaan potensi sumberdaya yang dimiliki daerah, ada beberapa strategi yang perlu dilakukan :

1. Halal Asessement

Pengawasan kehalalan suatu produk perlu ada legitimasi dari unsur unsur terkait misalnya MUI (majelis ulama Indonesia) dalam hal memastikan bahwa produk produk yang dihasilkan dalam suatu industry telah di asessement kehalalannya dari mulai proses, distribusi dan produknya. Tentunya cakupan produk ini sangatlah luas tidak terbatas pada produk fisik saja, seperti pangan, kesehatan dan kosmetik tetapi juga produk non fisik seperti pariwisata halal dan industry kreatif yang juga membawa konsep halal. Pemerintah perlu memfasilitasi konsep halal untuk produk non-fisik bersama unsur terkait agar secara utuh halal industry ini dapat diterapkan dalam kawasan halal industry. Sebagai outputnya dari asessement ini adanya legitimasi halal (pengakuan) baik dalam bentuk logo halal untuk produk, sertifikasi halal *processing* (halal certified) untuk proses produksi maupun teknisinya.

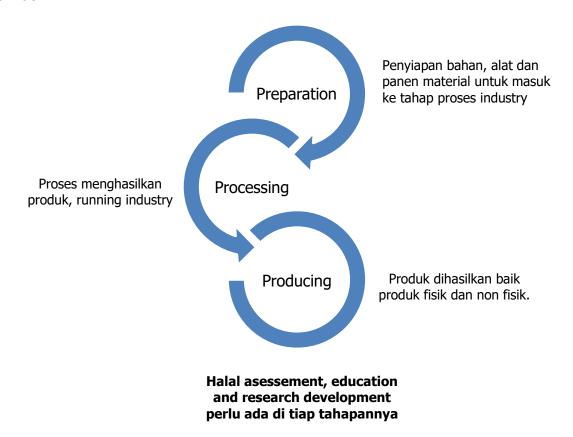
2. Halal education

Untuk mendukung terlaksananya dan dapat diterapkannya kawasan halal industry, maka edukasi tentang konsep halal perlu dilakukan secara simultan. Edukasi akan menjadi *brain investment* untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang dapat menjalankan kawasan industri halal. Selain itupula, edukasi akan memudahkan proses kolaborasi dengan masyarakat pemilik kawsaan di sekitar halal industry dan para pemasok bahan baku. Kegiatan kegitan edukasi halal dapat dilakukan dengan menggandeng media sebagai corong manipulasi massa, perguruan tinggi melalui program penelitian dan pengabdian masyarakat dan tentu pula pemerintah melalui kebijakan dan regulasinya.

3. Halal with research development

Strategi yang juga sangat penting untuk mendukung kawasan industry halal adalah riset dan pengembangannya. Berdasarkan data potensi sumber daya yang dimiliki NTB dari sektor maritime, pertanian, peternakan dan pariwisata maka potensi yang melimpah ini perlu untuk diberdayakan. Melalui riset maka dapat ditemukan kandidat pengganti bahan bahan non halal yang berbasis potensi lokal. Dalam konteks kehalalan produk, riset akan menjadi penentu tingkat kehalalan produk secara cepat melalui teknologi pendeteksi bahan non halal dan riset juga dapat mengukur penerimaan konsep halal dalam proses industry dan persentase tingkat penerapan proses halal yang dilakukan di tengah tengah masyarakat.

Untuk menjalankan dan penerapan kawasan industry halal, secara ringkasnya diilustrasikan berikut :



ANALSISI SWOT NTB HIP

Mengetahui peta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (analisis SWOT) menjadi penting dalam merencanakan pengembangan program pembangunan. Begitu pula dengan pengembangan kawasan industri halal. Peta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pengembangan HIP adalah sebagai berikut:

KEKUATAN:

- 1. Provinsi NTB memiliki luas laut dan teluk yang dapat dikembangkan sebagai bahan baku industri perikanan sehingga memungkinkan untuk membangun usaha (investasi) di sektor perikanan dan kelautan dalam HIP.
- 2. Provinsi NTB juga memiliki luas lahan dan kawasan potensial untuk pengembangan peternakan, seperti di Tambora dan beberapa kawasan lainnya untuk pengembangan usaha (investasi) dibidang peternakan di HIP.
- 3. Provinsi NTB menjadi primadona pariwisata dunia, pasca terselenggaranya MOTO GP. Sehingga HIP tidak saja dapat dikembangkan sebagai pusat industri manufaktur namun terintegrasi dalam pengembangan industri pariwisata.
- 4. Dari sisi lokasi, NTB memiliki KEK Mandalika yang dapat diintegrasikan dengan potensi pengembangan wisata di HIP.
- 5. Infrastruktur logistik, penerbangan dan Pelabuhan laut cukup memadai untuk aktivitas ekspor dan impor di NTB.

KELEMAHAN

- 1. Provinsi NTB belum pernah terbangun kawasan industri berbasis ekosistem industri atau model terintegrasi, sehingga belum cukup berpengalaman.
- 2. SDM industri manufaktur NTB masih relatif terbatas untuk industrialisasi
- 3. Infrastruktur untuk pembangunan industri seperti ketersediaan listrik, air bersih dan lain-lain masih relatif terbatas.

PELUANG

- 1. Adanya komitmen pembiayaan dari MUI untuk pengembangan HIP
- 2. Produk yang dihasilkan HIP dapat menjangkau pasar kawasan tengah dan timur Indonesia.
- 3. HIP menjadi menu baru sebagai episentrum ekonomi di NTB karena mengombinasikan antara industri manufaktur dan pariwisata secara terintegrasi.
- 4. Wisatawan konvensional dalam dan luar negeri yang berkunjung ke NTB dapat didorong untuk berkunjung di HIP

5. Dari posisi HIP diapit oleh dua potensi kawasan strategis nasional. Sebelah timur ada KEK Labuan Bajo dan sebelah barat berdampingan dengan potensi Wisata Bali

TANTANGAN

- Kondisi ekonomi Global yang belum menentu, seperti perang antara Rusia dan Ukraina yang belum dapat diprediksi kapan berakhir. Sehingga mempengaruhi keputusan investasi industri secara global dan mempengaruhi stabilitas kurs dalam negeri.
- 2. Pandemi Covid-19 yang belum dapat diprediksi kapan berakhir sehingga mengganggu penerbangan keluar dan masuk NTB.
- 3. Iklim industri dan pariwisata yang perlu terus dipupuk di NTB sehingga menyebabkan orang leluasa berinvestasi dan berwisata di NTB
- 4. Penganggaran pemerintah yang terbatas karena rendahnya pendapatan akibat terjadinya pandemi Covid-19.
- 5. Pola pembangunan program terintegrasi antar OPD, OPD dengan DU-DI dan Universitas yang belum terealisasi dengan baik.

BAB III

KONSEP HALAL INDUSTRIAL PARK (HIP)

Pengertian Kawasan Industri Halal

Sebelum menjelaskan definisi kawasan industri halal atau Halal industrial Park (HIP), sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu pengertian kawasan industri. Berdasar peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/ M.IND/PER/6/2016 kawasan industri diartikan sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Di dalam kawasan industri terdapat perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan mengelola kawasan industri dan tata tertib kawasan industri yang disusun pengelola untuk mengatur hak dan kewajiban berbagai entitas dalam kawasan industri. Adapun tujuan pembangunan kawasan industri berdasar peraturan pemerintah Nomor 142 tahun 2015 adalah:

- 1. Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri
- 2. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan
- 3. Meningkatkan daya saing investasi dan industri
- 4. Memberi kepastian lokasi industri sesuai tata ruang.

Sehingga prinsip dasar dari pembangunan kawasan industri adalah kesesuaian tata ruang, ketersediaan infrastruktuf, ramah linkungan, efisiensi dan adanya keamanan dan kenyamanan berusaha.

Terkait dengan kawasan industri halal, diatur dalam peraturan Menteri perindustrian Nomor 17 tahun 2020. Di mana pengertian kawasan industri halal adalah seluruh atau Sebagian dari kawasan industri yang dirancang dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk halal. Sementara itu, produk halal merupakan produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam serta berdasar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kawasan Industri dalam Tataran Konsep

Bicara industrialisasi secara luas, akan terdiri dari beberapa konsep bahasan. Masing-masing konsep berperan strategis dalam pengembangan industrialisasi. Konsep-konsep tersebut diantaranya terkait produk industri, Sumber Daya Manusia (SDM), Industri (Tenaga Kerja dan Manajer). Industri atau Perusahaan dapat berupa perusahaan mikro, kecil, menengah dan besar dan Kawasan Industri. Bila hanya membahas pengembangan produk saja, saat ini hampir semua pihak (industri) mampu memproduksi barang dan jasa.

Demikian pula dengan membangun SDM Industri cukup diberi pelatihan dan pendampingan, demikian halnya pengembangan industri cukup diberi modal untuk memperluas skala bisnis dan dilakukan pendampingan. Namun membangun sinergi, ekosistem bersama dari hulu sampai hilir, dari produksi, distribusi, komersialisasi sampai pasar inilah yang sedikit rumit. Konsep sinergi dan ekosistem ini kita sebut sebagai kawasan industri. Lebih spesifiknya disebut sebagai *Industrial Cluster*.

Industrial Cluster dikatakan rumit karena melibatkan banyak orang, melibatkan kerja sama dan saling kesepahaman. Modal ini disebut modal sosial. Oleh karena itu, membangun dan mendesain kawasan industri menjadi langkah strategis. Tidak saja membangun kawasannya, namun juga membangun produknya, SDM, dan industrinya. Cluster dipahami sebagai komunitas yang terkonsentrasi secara geografis yang memperkuat keunggulan kompetitif satu sama lain (Herbez and Balakina, 2021)

Pembangunan kawasan industri berbasis kluster fokus pada hubungan antara kluster industri dan inovasi, fitur dan mekanisme dinamis inovasi kluster industri, proses inovasi kluster industri, model inovasi kluster industri, dan sistem inovasi kluster industri (Li, Wen dan Youxia, 2010). Menurut Kuchiki dan Tsuji (2008), ada beberapa kapasitas yang perlu disiapkan dalam pembangunan kawasan industri berbasis kluster (Akifumi Kuchiki and Masatsugu Tsuji):

- 1. Infrastruktur, terdiri dari air bersih, listrik, telekomunikasi dan transportasi
- 2. Kelembagaan, terdiri dari sistem *one stop service*, deregulasi, insentif pajak dan kemudahan lain, hukum dan regulasi misalnya untuk hak properti dan lain-lain.
- 3. Kapasitas sumber daya manusia, yang tidak terdidik, terdidik dan professional.
- 4. Kondisi lingkungan, di mana apakah tersedia perumahan, sekolah standar internasional, rumah sakit dan hiburan.

Dalam perspektif bisnis, Zhao et al. (2006), menyarankan dalam mengukur dan menentukan konfigurasi strategi manufaktur, yaitu harga murah, desain yang fleksibel, kemampuan melakukan perubahan dengan cepat terhadap produk barang dan jasa, kemampuan memperkenalkan produk baru, lini produk yang luas, volume yang fleksibel, kualitas yang sesuai, kualitas kinerja, kecepatan pengantaran (logistik), keandalan pengiriman dan service purna jual.

Tata Kelola kawasan industri umumnya dengan model *triple helix,* yang dalam pengembangan kawasan terdiri dari beberapa unsur, yaitu: Pemerintah, Kampus dan Dunia usaha. Model *triple helix* pertama kali dipopulerkan Etzkowitz. Menurut Etzkowitz dan Zhou (2017) *triple helix* diartikan sebagai bentuk interaksi dalam melahirkan inovasi antara universitas, industri dan pemerintah (Firmansyah dan Suman, 2021). Entitas yang

terlibat dalam kawasan standarnya adalah yang memiliki kepentingan langsung terhadap tata Kelola bisnis. Artinya, masing-masing Lembaga memiliki kewajiban membesarkan kawasan karena mendapat manfaat langsung dari aktivitas bisnis dalam kawasan. Pemerintah daerah berkepentingan untuk mewujudkan industrialisasi, menumbuhkan investasi, mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang dapat terfasilitasi dalam kawasan. Dunia usaha memiliki kepentingan untuk meningkatkan keuntungan dengan perluasan skala produksi maupun pasar dalam kawasan. Sementara itu, perguruan tinggi mendapat manfaat dari riset-riset yang dilakukan di kawasan sebagai kewajiban menjalankan tri dharma perguruan tinggi. Khususnya dibidang penelitian dan pengabdian.

Pelaku, Infrastruktur dan Aktivitas dalam Kawasan

Pembangunan kawasan industri tetap memperhatikan aspek keberlanjutan. Aspek keberlanjutan akan tergantung pada: 1) Bahan baku industri, 2) Pasar industri dan, 3) Tata kelola. Ketiga aspek tesebut dapat dijabarkan berdasarkan poin-poin keberlanjutan yang terdapat dalam Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai berikut:

- 1. Keberlanjutan **bahan baku** terdiri dari kepedulian terhadap ekosistem darat, ekosistem air, pencegahan perubahan iklim yang dapat menggangu pasokan bahan baku dengan meminimalisir emisi karbon dari HIP, dan sinergi untuk menjamin keberlanjutan ketersediaan bahan baku.
- 2. Keberlanjutan tata kelola terdiri dari penjaminan air bersih dan sanitasi layak, tersedianya energi bersih, memberikan pekerjaan yang layak, menjamin kesehatan dan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan, tanpa kelaparan, menjamin produksi dan konsumsi berkelanjutan, menciptakan kawasan industri yang ramah dan cepat beradaptasi dengan inovasi dengan penyediaan infrastruktur berkelanjutan sehingga tercipta kawasan kota dan komunitas berkelanjutan.
- 3. Keberlanjutan **pemasaran** terdiri dari penyediaan inovasi pemasaran dan memaksimalkan sinergi untuk mencapai tujuan kawasan industri halal.

Sebelum membangun kawasan industri perlu diperhatikan ketiga aspek di atas. Kawasan industri halal oleh kementerian perindustrian dimaknai sebagai ekosistem halal. Di mana ekosistem tersebut terdiri dari: 1) Industri halal, 2). Infrastruktur industri halal, sistem logistik halal, sertifikasi halal dan peningkatan SDM industri halal, pembiayaan Syariah dan edukasi dan promosi halal.

Lebih jauh menurut kementerian perindustrian, infrastruktur industri halal adalah berupa pembangunan Kawasan Industri Halal yang meliputi R dan D, sumber bahan baku, produksi dan distribusi yang akan menyokong sistem logistik, penerapan sertifikasi dan penerapan pembiayaan Syariah. Sistem Logistik Halal Melingkupi hub, rute, tata kelola

gudang, transportasi, port yang telah terlengkapi ketelusuran, pelacakan, dan pengujian (blockchain, AI, Integrated System, IoT, RFID dan Traceability System). Lembaga/ layanan jasa keuangan dan perbankan syariah, penyusunan skema relaksasi IKM halal. Penjualan dan pemasaran meliputi label branding dan pemasaran sesuai Syariah. Adapun bagan ekosistem halal di sajikan di bawah ini:

Edukasi dan promosi halal

Pembiayaan syariah

Sistem Logistik Halal

Sertifikasi Halal

Bagan. 3.1 Ekosistem Halal

Dalam menjamin keberlanjutan bisnis halal, penyediaan bahan baku industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat beberapa komoditas cukup memadai, antara lain terdiri dari sektor perikanan (maritim), pertanian, perkebunan dan peternakan. Kawasan industri akan mengolah bahan baku menjadi produk industri berdasar pohon industrinya. Ketersediaan bahan baku ini perlu ada kepastian dalam hal jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas). Bila jumlah tidak mencukupi akan diupayakan dipasok dari luar daerah. Untuk kebutuhan tertentu. Kawasan industri akan juga menyediakan lahan sebagai tempat budidaya. Bisa dalam bentuk peternakan atau perkebunan terintegrasi (*urban farming*). Model kawasan industri halal yang disyaratkan kementerian perindustrian adalah:

- 1. Memiliki infratruktur dasar, yang terdiri dari:
 - ✓ Jaringan jalan
 - ✓ Jaringan listrik
 - ✓ WWTP
 - ✓ WTP
 - ✓ Saluran Drainase

- 2. Memiliki Perizinan Berusaha Kawasan Industri dengan persyaratan:
 - 3. NIB + Izin
 - 4. Minimal lahan 50 Hektar
 - 5. Berada di KPI
 - 6. Memiliki masterplan
 - 7. Memiliki Tata tertib KI dan struktur organisasi
 - 8. Membangun gedung pengelola dan sebagian infrastruktur dasar
- 3. Memiliki Surat Keterangan Kawasan Industri Halal
 - 1. Perizinan Berusaha Kawasan Industri
 - 2. Memiliki masterplan KI Halal
 - 3. Lahan dapat berupa seluruh kaveling industri atau Sebagian kaveling industri untuk area atau zona halal.

4. Menyiapkan:

- 1. Tim Manajemen Halal
- 2. Sistem Manajemen Halal
- 3. Kantor pengelola
- 4. Laboratorium halal
- 5. Lembaga pemeriksa halal (LPH)
- 6. Instalasi pengolahan air baku khusus industri halal
- 7. Pembatas

Untuk pengembangan kawasan industri halal di NTB, akan dilakukan pembangunan infrastruktur dengan pertimbangan sebagai berikut:

Jaringan jalan pada kawasan industri halal akan dibangun dengan mengintegrasikan sistem *urban farming* sepanjang jaringan jalan. Sistem urban farming ini yang dilengkapi sistem cerdas sehingga pengelolaannya menjadi lebih mudah dan hemat. Secara teknis, pengelolaan urban farming akan memanfaatkan sistem Internet of things (IoT), AI, dan automasi.

Untuk **Kebutuhan listrik** perlu diperhitungkan dengan matang karena berpotensi menjadi salah satu penyumbang emisi karbon yang besar. Kawasan industri halal akan dipersiapkan untuk adopsi sumber energi hijau secara bertahap walaupun pada tahap awal menggunakan

listrik yang disediakan oleh PLN. Dalam penyediaan sumber energi hijau ini, akan dilakukan kerjasama dengan pihak PLN sebagai perusahaan induk yang mengurus kelistrikan negara.

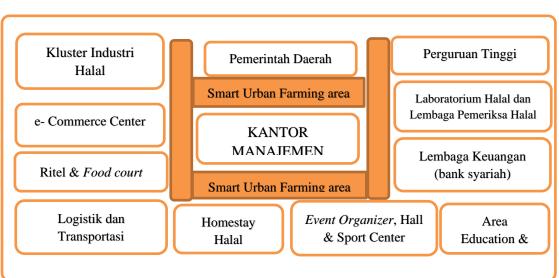
Pengelolaan **saluran drainasi** akan dilkukan oleh bidang khusus yang menangani management limbah kawasan. HIP akan dirancang menjadi kawasan industri yang bersahabat dengan alam dan masa depan. Sebisa mungkin, tidak akan ada penumpukan sampah di kawasan atau menjadikan HIP sumber sampah baru yang susah dikelola. Dalam hal ini, HIP akan bekerjasama dengan TPA dan akademisi serta pihak terkait demi menjamin pengelolaan limbah. Bidang ini akan berkonsultasi penuh dengan bagian *water treatment plan (WTP) dan wastewater treatment plant (WWTP)*.

Untuk bagian perizinan dan pengurusan administrasi, akan dilakukan tim pembentukan HIP secara langsung. Pada tahap persiapan, pemerintah dan universitas akan bekerjasama terutama untuk pembentukan tim manajement halal, sistem manajemen halal, laboratorium halal, lembaga pemeriksa halal, dan instalasi pengolahan air baku khusus industri halal.

Berdasar keunggulan yang dimiliki NTB, yaitu keunggulan dalam menghasilkan bahan baku produksi dan pariwisata, NTB menawarkan HIP yang mengintegrasikan antara produksi manufaktur halal dan jasa pariwisata. Ada beberapa institusi (lembaga) terintegrasi yang akan dibangun dalam kawasan industri sebagai bagian dari ekosistem bisnis dalam HIP, yaitu:

- 1. Manajemen (pengelola) halal atau Organisasi inti. Organisasi ini merupakan kumpulan perwakilan semua entitas bisnis dalam kawasan. Tugas Organisasi Menyusun aturan main (*the rule of the game*). Agar dapat mempercepat pengembangan, entitas bisnis yang dimaksud adalah unsur pelaku industri, pemerintah, dan akademisi. Ketiga entitas perlu sering bertukar pikiran agar dapat berkembang lebih cepat.
- 2. Laboratorium Halal dan Lembaga Pemeriksa halal yang memastikan produk yang diproduksi dlakukan secara halal. Bagian ini akan melibatkan pihak universitas melalui skema riset, pengabdian kepada masyarakat, dan skema lainnya yang mungkin dilakukan.
- 3. Universitas sebagai pusat *Research and Development* (R&D). Universitas dapat berkontribusi mulai dari aktif melakukan penelitian untuk menjamin bahan baku, membantu masyarakat dalam perbaikan produk, mempercepat adopsi teknologi dan inovasi, teknik pengemasan, pengelolaan bahan, management biodiversitas, mengawasi limbah, mempercepat adopsi teknologi hijau untuk kawasan, membantu event organizer, publikasi ilmiah, membantu HAKI, dan hal-hal yang terkait tridharma perguruan tinggi.

- 4. Kluster industri halal. Dapat berupa Marshalian Cluster artinya industri yang dikelompokkan adalah industri kecil.
- 5. Bisnis Sport Business dan juga kebugaran sebagai bisnis turunan dalam kawasan.
- 6. Bisnis logistik atau transportasi. Untuk distribusi keluar masuk produk, bahan baku, dokumen dan lain-lain di kawasan industri.
- 7. Jasa perdagangan dapat menyediakan food court, dan perdagangan (ritel) hasil produksi di kawasan.
- 8. Event organizer. Tugasnya merumuskan agenda kegiatan di kawasan industri sehingga kawasan industri selalu padat pengunjung. Serta terdapat aktivitas bisnis yang padat. Bagian ini dapat bekerjasama dengan masyarakat adat, pemuda, universitas, dan pihak lain yang terkait.
- 9. Lembaga keuangan atau Perbankan syariah. Dalam menyediakan transaksi keuangan, ATM, *money changer* dan lain-lain. Dalam konteks ini diprioritaskan bank milik daerah. Tidak menutup kemungkinan bank akan menawarkan kredit modal untuk investasi pengembangan bisnis bagi industri di kawasan industri.
- 10. Pemerintah daerah menjadi tempat penyusunanan regulasi kawasan, pengurusan perijinan, pemberian insentif dan lain-lain.
- 11. Kawasan budidaya pertanian, peternakan dan lain-lain. Kawasan ini akan dibangun kebun bunga yang beraneka ragam. Sebagai pusat destinasi wisata botani bagi masyarakat.
- 12. Home stay halal sebagai tempat menginap wisatawan yang berkunjung di NTB HIP.
- 13. E-commerse center adalah platform atau market place yang disediakan untuk pemasaran produk-produk kawasan secara online. Ketersediaan jasa E-Commerce yang terkontrol di kawasan akan membuka banyak lowongan kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- 14. Area edukasi dan rekreasi merupakan destinasi pendidkan dan wisata baru berbasis alam yang disediakan dalam kawasan.



Bagan 3.2. Peta Kawasan NTB HIP

ESTIMASI PRODUK YANG DIHASILKAN

Kawasan industri akan menghasilkan beberapa produk inti dan turunan, diantaranya adalah:

- 1. Produk perikanan, pertanian dan peternakan berupa frozeen food. Frozeen food terdiri dari daging beku, naget, sosis, bahan hamburger dan lain-lain. frozeen food akan didistribusikan ke seluruh NTB bahkan ke seluruh Indonesia.
- 2. Produk obat-obatan dan kosmetik, yang diproduksi perusahaan besar yang membuka cabang (tenant) bisnis di HIP.
- 3. Jasa-jasa. Jasa perdagangan, pameran, pusat olah raga dan kebugaran serta jasa transportasi. Produk yang dihasilkan dalam kawasan perlu dibuatkan model integrasi vertikal. Artinya, ada outlet makanan atau rumah makan yang memanfaatkan produk hasil kawasan industri.
- 4. Kawasan juga akan menghasilkan bahan baku pertanian dan peternakan yang dihasilkan rekayasa pertanian, bisa berupa *urban farming* di kawasan. Di kawasan juga dapat terbangun taman bunga, yang berisi berbagai jenis bunga yang merupakan bagian rekayasa modern.

PERAN ORGANISASI (MANAJEMEN) KAWASAN

Kawasan dirancang tidak saja untuk menghasilkan produk dan akumulasi modal, namun juga berupaya mendatangkan orang yaitu wisatawan, kunjungan pendidikan, studi banding maupun tugas kerja. Sehingga kawasan industri dirancang menjadi lokasi yang padat aktivitas, baik aktivitas produksi klaster industri maupun aktivitas perdagangan, pariwisata, pameran, lomba-lomba dan edukasi (Pendidikan).

Dalam memenuhi kebutuhan produksi industri dalam kawasan, bahan baku sebagian besar di datangkan dari luar kawasan. Namun masih di wilayah provinsi NTB. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat NTB termaksud memiliki produksi pertanian, perikanan maupun peternakan yang cukup besar. Bila belum dirasa cukup akan didatangkan dari luar NTB.

Manajemen beranggotakan perwakilan dari institusi-institusi dalam kawasan. Ada beberapa tugas manajemen, antara lain memastikan jalannya koordinasi masing-masing institusi. Manajemen juga menjadi penghubung atau call center. Di samping itu manajemen dapat membangun *plat form market place* atau karena NTB Mall sudah tersedia dapat di merger ke dalam NTB Mall. Tugas paling utama dari manajemen adalah menyusun *the rule of the game* atau *institutional arrangement* yang akan menjadi pedoman bersama dalam membesarkan kawasan.

Dengan demikian, manajemen mengatur ekosistem bisnis secara keseluruhan. Aspek produksi, distribusi, komersialisasi dan penyediaan pasar adalah rangkaian kerja sama bagi

pelaku dalam kluster industri dalam kawasan. Manajemen dapat membangun jejaring, menghadirkan investor luar dan menjembatani berbagai pihak yang bertransaksi dalam kawasan.

ALUR PRODUKSI DALAM KAWASAN

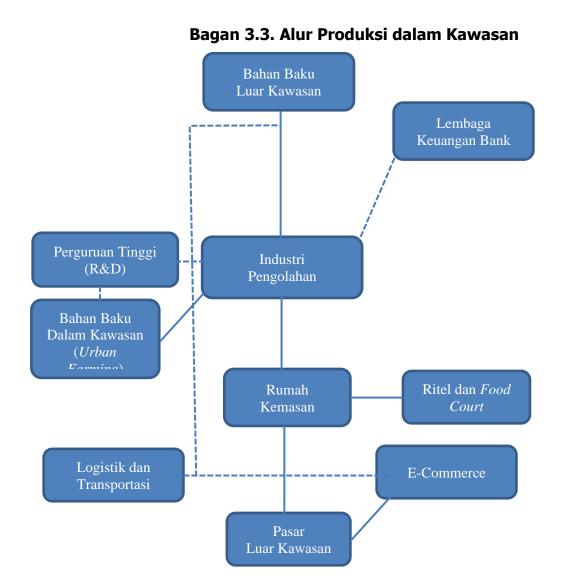
Bahan baku industri dapat berasal dari luar kawasan dan dalam kawasan diolah oleh industri kluster. Industri kluster akan memproduksi sesuai peruntukan mengacu pada pohon industri.

Industri kluster akan didampingi Perguruan Tinggi dalam bentuk R&D. Memastikan kualitas produk dan kelayakan produk. Produk yang dihasilkan selanjutnya menuju proses sertifikasi, yaitu melalui BPOM dan sertifikasi halal MUI.

Setelah semua proses produksi selesai. Dalam meningkatkan kualitas pengemasan produk masuk ke rumah kemasan. Di sinilah pentingnya rumah kemasan. Produk yang laku di pasaran tidak saja karena kualitas atau rasanya baik namun juga terkait pengemasan produk.

Maka, produk akhir yang dihasilkan industri dalam kawasan akan tersimpan di berbagai entitas perdagangan, baik yang ada di NTB maupun di luar NTB. Sehingga, entitas bisnis kawasan memiliki *cold storage* sebagai tempat penyimpanan (*storage*) dan platform perdagangan (*market place*) sebagai platform perdagangan.

Produk juga diupayakan akan diekspor keluar kawasan untuk kebutuhan ritel di NTB dan juga ekspor ke luar daerah atau keluar negeri. Bila diperlukan kawasan bisnis membuat entitas bisnis di kota-kota besar sebagai perwakilan kawasan.

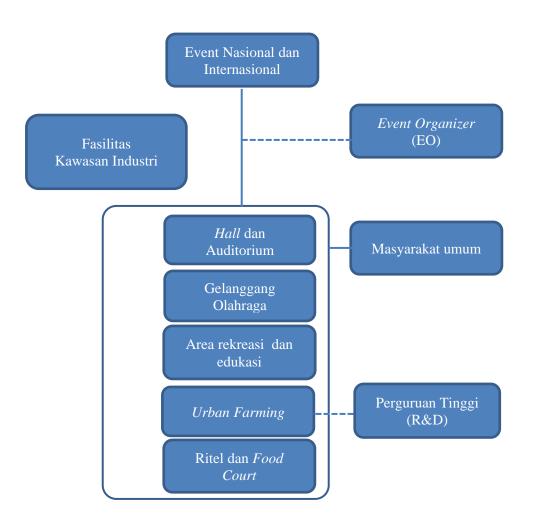


PENYELENGGARAAN EVENT DI KAWASAN

Dalam menghidupkan kawasan, *event organizer* akan mengagendakan penyelenggaraan Event di kawasan. Event besar, berskala nasional maupun internasional. Berpeluang datangkan orang berkunjung ke kawasan. Event ini misalnya lomba memasak, lomba olah raga tertentu, pagelaran seni budaya, lomba pengembangan ekonomi kreatif berbasis IT. Misal dengan penyelenggaraan event lomba *sport game*. Di samping itu wisatawan yang berkunjung ke Lombok yang menikmati objek-objek wisata konvensional, diarahkan untuk mengunjungi kawasan industri sebagai bagian terintegrasi dari pariwisata.

Pentingnya jumlah kunjungan dalam rangka meningkatkan nilai ekonomi kawasan. Pengunjung akan disediakan semacam wahana untuk mengelilingi kawasan. Menikmati makanan dan minum khas NTB yang disediakan unit Food Court dan pameran produk kerajinan kawasan. Kawasan juga disediakan untuk aktivitas olah raga ringan dan fasilitas untuk difabel, sehingga memberi kenyamanan bagi semua pengunjung.

BAGAN 3.4 Event Dalam Kawasan



BAB IV

PETA JALAN (ROAD MAP) NTB HIP

Peta jalan pembangunan kawasan industri berbasis Industrial Kluster Base dititik tekankan pada penguatan akar kolaborasi dan ekosistem bisnis. Sehingga membangun kawasan harus disiapkan kerangka dasar yang kokoh sehingga dapat berkesinambungan. Beberapa kerangka itu antara lain aspek kelembagaan (organisasi), infrastruktur dasar, mekanisme kerja (sistem) atau *institutional arrangement* dan juga mitra bisnis di luar kawasan.

Dalam pengembangan NTB HIP dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahapan pembangunan dan tahapan pengelolaan.

1. Tahapan Pesiapan

Tahapan persiapan dilakukan pada semester I tahun 2022 sampai semester I 2023 meliputi:

- 1. Pembentukan Tim Pelaksana *Roadmap* NTB HIP yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu Perangkat Daerah, Akademisi dan Dunia usaha atau dunia industri
- 2. Pemilihan Lokasi

Lokasi HIP NTB akan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 40/M-IND/PER/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri yang mengatur penetapan lokasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Jarak ke pusat Kota;
- b. Jarak Terhadap Pemukiman;
- c. Jaringan transportasi darat;
- d. Jaringan Energi dan Kelistrikan;
- e. Jaringan Telekomunikasi;
- f. Pelabuhan Laut;
- g. Sumber Air Baku;
- h. Kondisi Lahan; dan
- i. Topologi Masyarakat Sekitar.
- 3. Penyusunan Dokumen Pendukung mencakup MasterPlan, AMDAL dan ANDALALIN;
- 4. Pengurusan Perizinan;
- 5. Pembebasan Lahan;
- 6. Penyusunan DED;
- 7. Koordinasi penguatan IKM sekitar kawasan NTB HIP sesuai potensi daerah terkait pembiayaan, penyuluhan, *supply* dan penguatan sentra IKM.

2. Tahapan Pembangunan

Tahap pembangunan NTB HIP dilakukan di semester II Tahun 2023. Dalam tahapan ini secara paralel akan dibangun kawasan secara fisik sekaligus dengan kelembagaannya. Adapun tahapan pembangunan sebagai berikut:

- Pembangunan fisik NTB HIP;
- Pembentukan pengelola NTB HIP;
- Penyusunan Prosedur Pengelolaan Kawasan;
- Penyusunan Kelembagaan Kawasan;
- Penyusunan Sistem Manajemen Halal dan Manajeman Mutu;
- Penyesuaian terhadap kriteria dan skema insentif bagi Halal Player dan NTB HIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pengusulan penetapan NTB HIP oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia.

3. Tahapan Pengelolaan

Pada tahapan pengelolaan akan dilakukan penguatan kapasitas kawasan, sistem kerja sekaligus pengelola atau manajemen kawasan. Tahapan ini akan dilaksanakan pada semester II Tahun 2024 sampai semester II Tahun 2025. Adapun tahapan pengelolaan sebagai berikut:

- Pengembangan SDM dan Riset kebutuhan HIP;
- Penyusunan Dokumen Pelayanan dan Pemasaran;
- Penerbitan Peraturan kriteria dan skema insentif bagi Halal Player;
- Pengembangan Bisnis dan Investasi dalam Kawasan;
- Integrasi ekonomi digital dan pemanfaatan jasa keuangan Syariah pada rantai Nilai Industri halal;
- Pengelolaan lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Analisis Dampak NTB HIP terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat NTB;
- Pelaporan dan Evaluasi.

TABEL ROADMAP PENGEMBANGAN NUSA TENGGARA BARAT HALAL INDUSTRIAL PARK

NO	PROSES KEGIATAN	STAKEHOLDER / LEADING SECTOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	KETERANGAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Α			TA	HAP PERSIAPAN				
1	Pembentukan Tim Pembangunan Kawasan Industri Halal	Disperin, Akademisi, Biro Hukum	SK Tim Pembangunan Kawasan Industri Halal	Tim Sekretariat Utama dan Tim Pembangunan Kawasan yang terdiri atas : Pemerintah, Akademisi dan Dunia Usaha/ Dunia Industri	٧			
2	Pemilihan Lokasi			Berdasarkan pada Permenprin No 40 Tahun 2016	٧			
1.1	Jarak ke Pusat Kota	Bappeda, Pemda	Data Geografi	Jarak Minimal 10 km	٧			
1.2	Jarak Terhadap Pemukiman	Pemda	Dokumen Topografi, Geografi	Jarak Minimal 2 km	٧			
1.3	Jaringan Transportasi Darat	DISHUB	Dokumen Transportasi Darat	Tersedia jalur arteri primer	٧			
1.4	Jaringan Energi dan Kelistrikan	ESDM	Data Sumber Daya Energi	Kapasitas disesuaikan dengan kebutuhan kawasan	٧			
1.5	Jaringan Telekomunikasi	KOMINFOTIK	Data Telekomunikasi	Kapasitas disesuaikan dengan kebutuhan kawasan	٧			
1.6	Pelabuhan laut	DISHUB	Dokumen Transportasi	Tersedia Pelabuhan Logistik	٧			
1.7	Sumber air baku	PUPR	Data Ketersediaan Sumber Daya Air	Danau, Sungai, Bendungan, Waduk, Embung, Air Tanah	٧			
1.8	Kondisi Lahan							
	a. Topografi			Kemiringan Max 15%				
	b. Daya Dukung Lahan	BAPPEDA, DISTANBUN,	Dokumen dan Data	Stigma Tanah : 0.7 - 1kg/cm²				
	c. Kesuburan Tanah	DLHK, BPN	Topografi, Data Geografi,	Non pertanian/ relatif tidak subur				
	d. Pola Tata Guna Lahan	DEIN, DIN	Keadaan Lahan	Non pertanian & non pemukiman				

	e. Ketersediaan Lahan			Min 5 Ha (IKM) / 50 Ha (IB)			
	f. Harga Lahan			Harga tanah relatif rendah			
1.9	Topologi Masyarakat sekitar Kawasan	Disdukcapilpemdes	Dokumen dan Data Demografi	Jenis Pekerjaan Masyarakat sekitar kawasan	٧		
	Hal lain yang diperhatikan			Berdasarkan pada Permenprin No 40 Tahun 2016	٧		
2.1	Prediksi jumlah tenaga kerja	DISNAKERTRANS	Dokumen Analisis Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja pada Kawasan	٧		
2.2	Pergerakan Orang dan Barang	DISHUB	Dokumen Proyeksi Kepadatan Lalu Lintas	Kepadatan Lalu Lintas	٧		
2.3	Prediksi Jumlah Kebutuhan Lahan	BAPPEDA	Dokumen dan Data Kebutuhan Lahan	Prediksi Penggunaan Lahan yang akan tumbuh	٧		
2.4	Prediksi Jumlah Infrastruktur Penunjang	BAPPEDA, DLHK	Dokumen dan Data Infrastuktur Penunjang	Prediksi Kepadatan sekitar kawasan pasca pembangunan	٧		
3	Penyusunan Dokumen			Berdasarkan pada Permenprin No 40 Tahun 2016	٧		
3.1	Rencana Induk (<i>Master Plan</i>)				٧		
	a. Target Karakteristik	Disperin, Akademisi, DLHK, BAPPEDA, Pemkab	Data Potensi Sumber Daya Industri	Sumber Daya Unggulan Kawasan			
	Jenis Industri	Disdag, Diskoperasi, Bappeda, KADIN	Data Potensi Pasar	Proyeksi Pangsa Pasar dan Distribusi Konsumen			
	b. Analisis Penataan	PUPR, DLHK	Dokumen Kebutuhan Lahan	Min 5 Ha (IKM) / 50 Ha (IB)			
	Pola Ruang	POPK, DLAK	Dokumen Komposisi Penggunaan Lahan	Kavling Industri Max 70%, RTH 10%, Saluran 10%, Infrastuktur 10%			
	c. Menyusun Site Plan	Akademisi, Bappeda, PUPR, DLHK	Dokumen Zoning Industri	Blok Industri sesuai limbah			
	d. Menyusun Rencana Pembangunan Infrastuktur	PUPR	Dokumen Ketersediaan Infrastuktur, Sarana Prasarana Dasar dan Penunjang KIH	Infrastuktur Dasar: Jalan, Jaringan Listrik, Jaringan Air, Jaringan Telekomunikasi, Saluran Limbah, Pengolahan Sampah, Drainase, Kantor Pengelola, Penerangan Jalan Umum, Pemadam			

				Kebakaran			
				Infrastukutur Penunjang : Poliklinik, Sarana			
1				Ibadah, Sarana Olahraga, Pos Keamanan, Kantin,			
i				Tempat Parkir, Lokasi Bongkar Muat			
	a Manusaum Amaliaia	Diamonia DADDEDA DDKAD	Dokumen Rencana				
	e. Menyusun Analisis Finansial	Disperin, BAPPEDA, BPKAD, BAPPENDA		Rencana Kebutuhan Anggaran Pembangunan Kawasan			
	Finansiai	BAPPENDA	Anggaran				
				Gambar detail bangunan terdiri dari gambar			
				rencana teknis. Gambar rencana teknis ini			
				meliputi arsitektur, struktur, mekanikal dan			
				elektrikal, serta tata lingkungan			
				Rencana Anggaran Biaya atau RAB volume			
	f. Menyusun Strategi		Dokumen Metode dan	masing-masing satuan pekerjaan. Kemudian			
	Pembangunan	PUPR	Teknik Pembangunan	dapat dibuat juga Daftar Volume Pekerjaan (Bill			
	Kawasan	POPK		of Quantity) serta spesifikasi dan harga.			
	Nawasan		(DED)	Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini			
				mencakup persyaratan mutu dan kuantitas			
				material bangunan, dimensi material bangunan,			
				prosedur pemasangan material dan persyaratan-			
				persyaratan lain yang wajib dipenuhi oleh			
				penyedia pekerjaan konstruksi			
				Menyusun model pengembangan kebijakan			
				sistem manajemen mutu dan lingkungan, melalui			
				tahapan yaitu menganalisis status keberlanjutan			
	g. Menyusun Sistem		Dokumen Pengelolaan	layanan pelanggan, mengidentifikasi faktor			
	Manajemen	Disperin	dan Sistem Manajemen	pengungkit, menganalisis faktor kunci y untuk			
	Wanajemen		Kawasan	alternatif kebijakan, serta menyusun model			
				pengembangan kebijakan integrasi sistem			
				manajemen mutu dan lingkungan			
	Analisis Dampak						
3.2	Lingkungan (AMDAL)			Berdasarkan pada Permenprin No 40 Tahun 2016	٧		
			Perda dan SK terkait	Penyusunan dan pengesahan melalui SK			
		DLHK, DPMPTSP	legalitas lahan	Gubernur			
		DILIK Bissada	SK Penanggungjawab dan	Penyusunan dan pengesahan melalui SK			
		DLHK, Disperin	Pengelolaan Lingkungan	Gubernur, Pemprakarsa			
		DLHK, Disperin	Kerangka Acuan Analisa	Isi dari KA-ANDAL antara lain izin tata ruang, izin			

				Analisis Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas, Simulasi Kinerja Lalu Lintas, Penanganan Dampak Lalu Lintas, Pemantauan dan Evaluasi, Gambaran Umum Lokasi			
3.3	Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	DISHUB, Disperin	Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	Berdasarkan pada Permenprin No 40 Tahun 2016	٧		
		DLHK, Disperin	Ringkasan Eksekutif	Berisi informasi apa pun yang menggambarkan bisnis kawasan industri, mulai dari target pasar, produk yang dibuat, anggaran keuangan, dan lain- lain			
		DLHK, Disperin	Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), (UPL)	Mengevaluasi efektivitas upaya pengelolaan proyek yang telah dilakukan, ketaatan penyelenggara proyek terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi analisis dampak			
		DLHK, Disperin	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), (UKL)	Mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif			
		DLHK, Disperin	Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal)	Selain itu juga harus ada sosialisasi dengan masyarakat sekitar berupa pengumuman Dampak penting yang telah diidentifikasi di dalam dokumen KA-ANDAL dianalisis lebih untuk mengetahui besaran dampak. Selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang telah ditetapkan dari pihak berwenang. Tahap berikutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan yang lainnya.			
			Dampak Lingkungan	prinsip lokasi, peta-peta terkait, dan lain-lain.			

4	Pengurusan Perizinan			Berdasarkan pada Permenprin No 40 Tahun 2016	٧		
	a. Izin Prinsip	Disperin, DPMPTSP	Dokumen Izin Prinsip	Izin Prinsip Investasi Baru, Izin Prinsip Perluasan, Izin Prinsip Perubahan, Izin Prinsip Merger			
	b. Izin Lingkungan	DPMPTSP, DLHK	Dokumen Izin Lingkungan	Menyusun Dokumen Lingkungan Hidup			
	c. Izin Lokasi	DPMPTSP	Dokumen Izin Lokasi	Permohonan dan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi			
	d. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	Disperin, DPMPTSP	Dokumen Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	Prosedur di atur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
		DLHK	Dokumen Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi	Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan			
		DLHK	Dokumen Izin Lingkungan, Izin Kelayakan Lingkungan	Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan, meliputi : 1. Persyaratan Administrasi dan Teknis			
	e. Hak Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi	DLHK	Dokumen Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan	 Pernyataan Komitmen : Menyelesaikan Amdal, UKL-UPL dan SPPL Menyelesaikan perizinan berusaha 			
	FIOUUKSI	DLHK	Peta Citra Pegindraan Jarak Jauh	 Menyelesaikan tata batas areal persetujuan pelepasan kawasan hutan Menyelesaikan pembayaran PNBP Menyelesaikan pembayaran PSDH dan Dana 			
		DLHK	Dokumen Pertimbangan Teknis	Reboisasi Menyelesaikan pembayaran penggantian nilai investasi Pengamanan Kawasan Hutan			

	f. Hak Guna Bangunan	PUPR, DPMPTSP, BPN	Dokumen Hak Guna Bangunan (HGB)	Hak guna bangunan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Untuk tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang hak pengelolaan			
	g. Izin Perluasan Kawasan Industri (IUKI)	DPMPTSP	Izin Perluasan Kawasan Industri (IUKI)	Melalui prosedur Dokumen Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)			
	h. Penetapan Status Kawasan Industri Halal	Disperin, DPMPTSP, MUI	Dokumen Surat Keterangan Kawasan Industri Halal	 Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI No 17 Tahun 2020, : Surat permohonan verifikasi kawasan industri halal Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Rencana induk/masterplan kawasan industri halal Bagan struktur dan sertifikat kompetensi tim manajemen halal Dokumentasi, dokumen kerja sama, dan/atau sertifikat akreditasi laboratorium Dokumentasi dan/atau dokumen kerja sama LPH Dokumentasi, dokumen kerja sama, dan/atau sertifikat halal instalasi pengolahan air baku Dokumentasi dan gambar teknik kantor pengelola Dokumentasi pembatas Dokumen sistem jaminan halal 			
5	Pembebasan Lahan	Pemprov, Pemkab, DLHK, Disperin	Dokumen Pembebasan Lahan	Rincian Kegiatan : Sosialisasi, Pengukuran Luas Lahan, Pemetaan Lahan, Kesepakatan Harga Jual, Pembayaran Harga Lahan	٧		
6	Penyusunan DED	PUPR, Disperin	Dokumen DED	Memuat Gambar Teknis, Dokumen Volume Pekerjaan & Estimasi RAB, Rencana Kerja dan Syarat (RKS)	٧		

NO	PROSES KEGIATAN	STAKEHOLDER / LEADING SECTOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	KETERANGAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
В	TAHAP PEMBANGUNAN								
1	Pembentukan Kelembangaan Kawasan Industri Halal	Disperin, Akademisi, Biro Hukum	SK Tim Pembangunan Kawasan Industri Halal	Pembentukan Pengelola NTB HIP		٧			
2	Rumusan Integrasi Logistik Halal	Disperin, MUI	Dokumen kelengkapan Sertfifikasi Halal Produk	Sosialisasi, Penyuluhan dan Penyatuan Pandangan serta persepsi terkait Integrasi Vertikal Ekosistem Ekonomi Halal dengan Pelaku Usaha . Pelaku Industri		٧			
3	Koordinasi penguatan IKM sekitar Kawasan Industri Halal sesuai potensi daerah	Disperin, Disdag dan Diskoperasi UMKM	Bimbingan teknis dan pendampingan serta FGD Penguatan IKM	Pembiayaan, Penyuluhan dan Supply		٧			
4	Pengusulan Kriteria dan Skema Intensif bagi Halal Player dan Kawasan Industri Halal	Disperin, MUI	Dokumen Roadmap Kawasan Industri Halal (NTB Park)	Pembangunan Skema Ekosistem Ekonomi Halal terpadu bagi pelaku usaha dalam kawasan		٧			
	_								
5	Pengajuan Penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian terkait Kawasan Industri	Disperin	Dokumen kelengkapan pengajuan Izin Usaha Kawasan Industri	Berdasarkan Permenprin No 45 Tahun 2019 : Penetapan Kawasan menjadi Kawasan Industri Terpadu		٧			

6	Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Halal	Disperin, MUI	Dokumen kelengkapan Sertfifikasi Halal Produk	Berdasarkan Permenprin 17 Tahun 2020 Penetapan Kawasan menjadi Kawasan Halal (NTB HIP) setelah penetapan kawasan Industri	V	
	Reterangan Halai			NTB HIF) Setelah penerapah kawasan muusti		
7	Pembangunan Fisik Kawasan Industri Halal NTB	Disperin	Perda RPIP, Pergub Roadmap NTB HIP	Pembangunan Infrastuktur Dasar dan Infrastuktur Penunjang	٧	
				Infrastuktur Dasar: Jalan, Jaringan Listrik, Jaringan Air, Jaringan Telekomunikasi, Saluran Limbah, Pengolahan Sampah, Drainase, Kantor Pengelola, Penerangan Jalan Umum, Pemadam Kebakaran		
				Infrastukutur Penunjang : Poliklinik, Sarana Ibadah, Sarana Olahraga, Pos Keamanan, Kantin, Tempat Parkir, Lokasi Bongkar Muat		

NO	PROSES KEGIATAN	STAKEHOLDER / LEADING SECTOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	KETERANGAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
С	TAHAP PENGELOLAAN								
1	Prosedur Pengelolaan Kawasan Industri sebagai Aset Milik Daerah	BPKAD	Dokumen Pengelolaan Aset Daerah	Berdasarkan PP No 28 Tahun 2020 : Melalui Surat Keputusan Pengguna Aset Daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota terkait kerja sama pemanfaatan dan kerjasama penyediaan infrastuktur melalui tender atau penunjukkan langsung			٧		
2	Kelembangaan Kawasan Industri	Disperin	Dokumen Pengelolaan Kawasan	Meliputi : Pengembangan SDM, Riset Pengembangan Infrastuktur, Pengelolaan Lingkungan, Pengelolaan Transportasi, Pengelolaan Air dan Pengelolaan Energi			٧		
3	Sistem Manajemen Halal dan Manajemen Mutu	Disperin, MUI	Dokumen SOP Manajemen Halal dan Manajemen Mutu Produk	Penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penetapan KIH NTB			٧		
4	Pelaksanaan Tata Tertib Kawasan Industri	Disperin	Dokumen Tata Tertib KIH	Pelaksanaan mekanisme manajemen operasional kawasan			٧		
5	Pelayanan	DPMPTSP	Dokumen SOP Pelayanan	Standar Operasional Pelayanan Internal Kawasan dan Eksternal kepada masyarakat			٧		
6	Pemasaran	DISDAG	Dokumen SOP Pemasaran	Proses Pemasaran dan Alur Distribusi Produk				٧	

7	Pengembangan Usaha					٧
	a. Pengembangan Usaha	Disperin, DISDAG, DISKOPUMKM	Dokumen SOP Pengembangan Usaha	Pengembangan Ekosistem Bisnis		
	b. Integrasi Ekonomi Digital dan Pemanfaatan Jasa Keuangan Syariah pada rantai Nilai Industri Halal	Disperin, DISDAG, DISKOPUMKM	Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kawasan	Kerjasama Dunia Usaha dengan Perbankan dan Investor		
	c. Investasi dalam Kawasan Industri Halal	DPMPTSP	Surat Izin Usaha Kawasan Industri	Surat Perjanjian Kerjasama, MoU, Dokumen Perusahaan / Investasi		
		DPMPTSP	Dokumen Master Plan	Rencana induk pembangunan kawasan melalui potensi dan masalah yang saat ini masih dimiliki oleh kawasan		
		DPMPTSP	Dokumen Rancangan Bisnis Proses	Rencana manajemen pemasaran dan proses pengembangan bisnis oleh investor di dalam kawasan industri		
		DPMPTSP	Dokumen Rencana Pembangunan Infrastuktur	Rencana pembangunan infrastuktur berkelanjutan yang disusun oleh investor dan atau pengelola kawasan industri		
8	Pengelolaan Lingkungan	DLHK	Dokumen Panduan Pengelolaan Lingkungan	Pengelolaan dan Kepedulian akan Lingkungan Pasca Pembangunan		٧
9	Kepedulian Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Disperin, Dinsos	Dokumen Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat	Hubungan Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (CSR)		٧
10	Penyusunan dan Pelaporan Kawasan Industri Halal	Disperin	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	Analisis Dampak Kawasan Industri Halal NTB terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat NTB		٧

BAB V

PENUTUP

Pembangunan kawasan industri halal atau NTB *Halal Industrial Park* (HIP) berdasar road map NTB HIP merupakan rangkaian tahapan pembangunan industrialisasi sebagai mana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB. Dalam mempercepat realisasi pembangunan NTB HIP, dibutuhkan sinergisitas yang kuat dari berbagai kalangan. Sehingga pembangunan fisik kawasan sekaligus kelembagaan (aturan main) dapat berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam *road map*.

Pemilihan karakteristik halal tidak saja berdasar peluang trend konsumsi produk barang dan jasa halal yang terus berkembang di dunia, namun juga sesuai kareteristik NTB, di mana pulau Lombok sempat menjadi pemenang world halal destination. Pembangunan NTB HIP secara konsep merupakan upaya pengembangan industri daerah berbasis ekosistem bisnis halal yang melibatkan unsur Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha-Dunia Industri. Artinya pemerintah daerah memfasilitasi berkembangnya produk, tata Kelola dan penguasaan pasar bagi dunia usaha dan industri di daerah dengan jejaring eksoistem bisnis. Keunikan dari NTB HIP adalah terintegrasinya produk halal dengan jasa pariwisata halal. Artinya, NTB HIP tidak saja menjadi pusat produksi produk halal namun juga sebagai pusat destinasi baru wisata halal.

Ada beberapa tahapan pengembangan dalam road map, yaitu tahapan persiapan, pembangunan dan pengelolaan. Ketiga tahapan ini, diharapkan dapat diselesaikan sampai semester ke-2 2025. Dengan demikian, diharapkan NTB HIP dapat meningkatkan kapasitas industri di NTB, mengurangi pengangguran sekaligus menurunkan angka kemiskinan di daerah.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH